


2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jalan Panggang Utama No.1, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul 55872
 088225209194, e-mail : panggang@gunungkidulkab.co.id
Website: panggang.gunungkidulkab.co.id



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Kapanewon Panggang Tahun 2025 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Kapanewon Panggang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Kapanewon Panggang Tahun 2021 - 2026.



Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stakeholders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Panewu Panggang

Panggang, 9 Februari 2026

PANEWU,



SUSTIWININGSIH, S.TP
NIP. 197109151998032008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kapanewon Panggang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Kapanewon Panggang Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2001.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kapanewon Panggang yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Capaian kinerja Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas”
Tujuan Kapanewon Panggang diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Dengan target tahun 2025 sebesar 96,39 dan capaian di tahun 2025 sebesar 96,42, maka tujuan sudah tercapai 100,03 persen.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”:
 - Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Program



Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 96,39%; capaian pada tahun 2025 terealisasi 96,42%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,03 %
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 94,11% terjadi peningkatan sebesar 0.04%.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 81,63; namun sampai laporan ini disusun, LHE AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Kapanewon Panggang mendapatkan nilai 81,62 masuk kategori Sangat Baik pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 80,20 terjadi peningkatan sebesar 1,42
 - Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80,20 terealisasi 81,62 sehingga capaian kinerja sebesar 101,77%.
4. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”:
- Diukur dengan indikator Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan



Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 1 potensi budaya lokal atau 100%; pada tahun 2025 terealisasi 1 potensi budaya lokal atau 100 %. Dengan demikian kinerja Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah sesuai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.

Capaian Kinerja yang sangat baik ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan serta berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Kapanewon Panggang pada tahun 2025.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga terjalin sinergitas dan harmonisasi yang baik dalam tiap tahapan pembangunan
2. Upaya peningkatan kapasitas diri bagi aparatur, sehingga tidak tertinggal dengan dinamika masyarakat yang sangat dinamis
3. Optimalisasi sumber daya aparatur yang secara kuantitas sangat terbatas, guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku



kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I _PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah.....	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi	6
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	8
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	10
BAB II _PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	16
B. Strategi dan Arah Kebijakan	18
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	27
BAB III _AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	30
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	51
C. Efisiensi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	58

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	10
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	11
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	15
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewo Panggang Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	17
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	18
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	19
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	22
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	25
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	26
Tabel II.6	Anggaran Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	26
Tabel III.1	Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Panggang Tahun 2025.....	33
Tabel III.3	Capaian Sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	35
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026	35
Tabel III.5	Capaian Kinerja Program pada Sasaran kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	40
Tabel III.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	42
Tabel III.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	44
Tabel III.8	Capaian Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	45
Tabel III.9	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	45
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 ...	46



Tabel III.11	Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	47
Tabel III.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD... Error! Bookmark not defined.	47
Tabel III.13	Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi kerakyatan	49
Tabel III.14	Perbandinagn Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026	49
Tabel III.15	Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Kerakyatan.....	50
Tabel III.16	Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Kerakyatan.....	56
Tabel III.17	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	56
Tabel III.18	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Panggung Daerah Kabupaten Gunungkidul.....	4
Gambar I.3. Pintu Masuk Kapanewon yang Mudah Diakses	12
Gambar I.4. Toilet Terpisah Laki-laki dan Perempuan	13
Gambar I.5 Ruang Tunggu Pelayanan	13
Gambar I.6 Halaman Luas	14
Gambar I.7 Fasilitas Sanitasi	14
Gambar II.1. E-SAKIP	27
Gambar II.2. SIPD	28
Gambar II.3. SIM ASET.....	28
Gambar II.4. Persediaan	29
Gambar II.5. SIPANDA.....	29
Gambar III.1. Rapat Pembinaan penyusunan peraturan kalurahan di RR Kapanewon	38
Gambar III.2. Pendampingan Penyusunan RPKal di RR Kapanewon Panggung.....	38
Gambar III.3. Forum Reformasi Birokrasi di RR Kapanewon Panggang	39
Gambar III.4. Layanan Pengambilan Dokumen di loket Pelayanan Umum	39
Gambar III.5. Pemantauan Pengamanan TPPR Gesing.....	39
Gambar III.6. Penerimaan Bantuan PAH.....	40

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**





BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.



LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Panggang Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



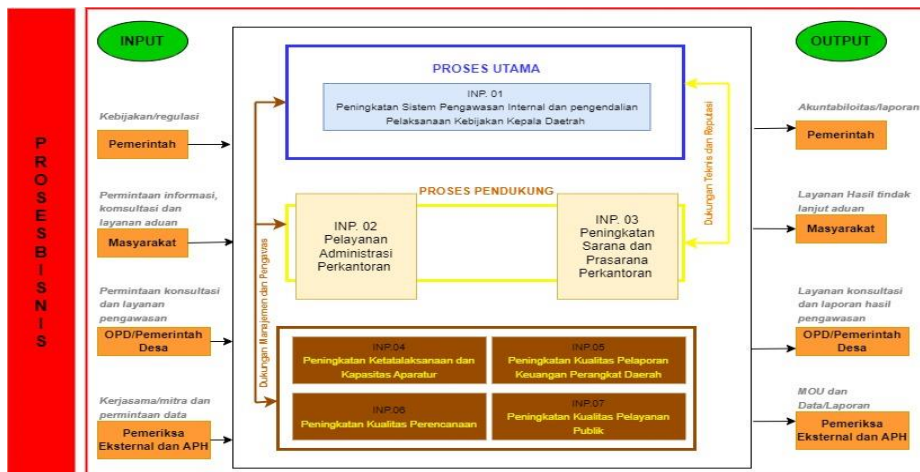
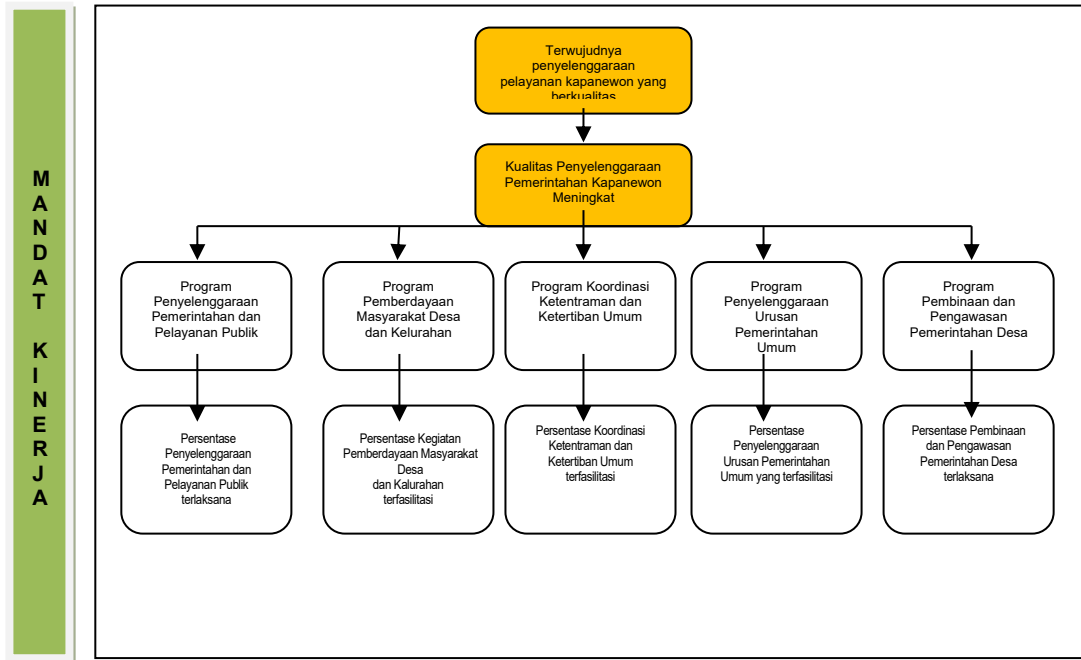
CASCADING KAPANEWON PANGGANG

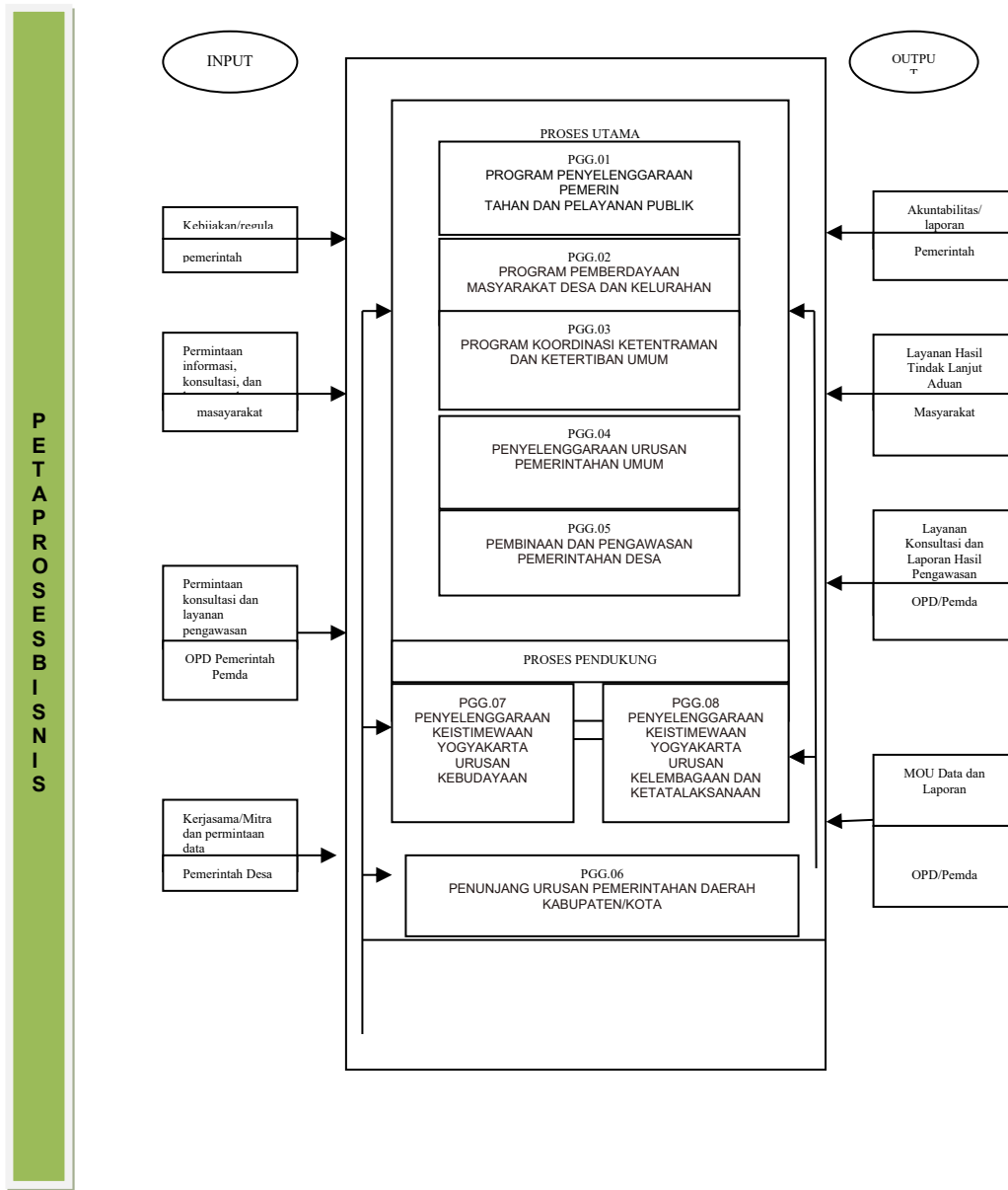


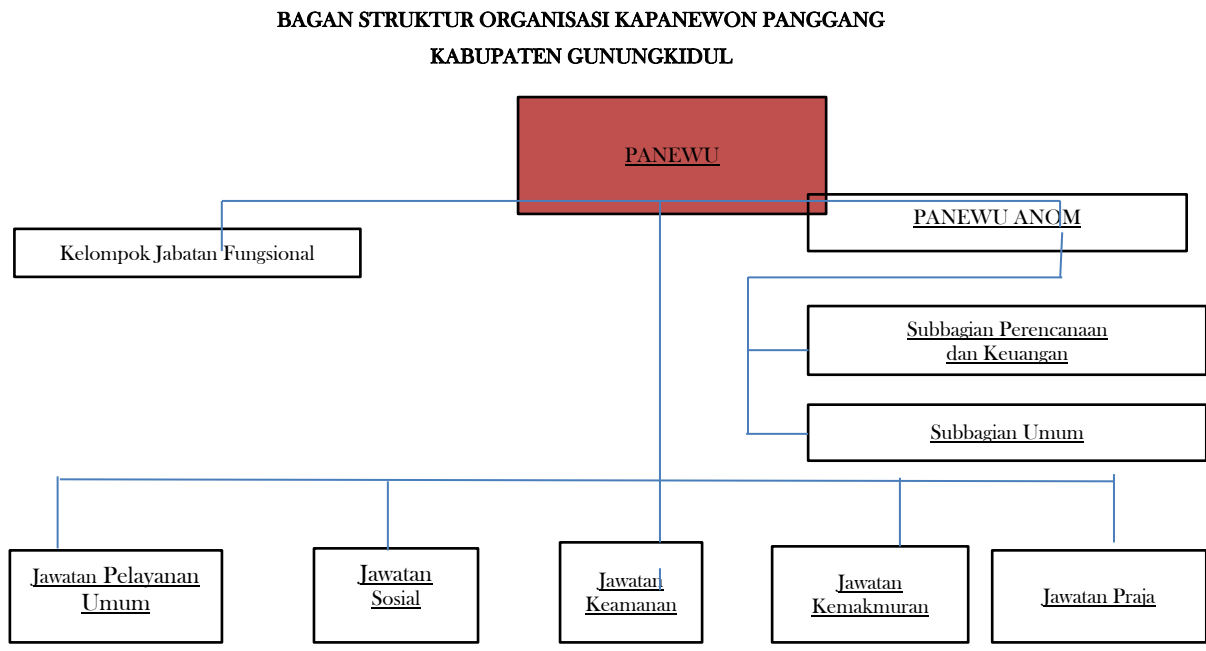
Gambar I.1. Cascading Kinerja



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi







Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Panggang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

1. Tugas Pokok

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap



perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;



- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Panggang. Pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Internal

- a. Kuantitas aparatur kapanewon yang dari tahun ke tahun semakin berkurang.
- b. Masih ada aparatur yang gagap teknologi.
- c. Tidak semua pegawai kompeten dibidangnya.
- d. Anggaran yang ada masih sebatas untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat rutin dan belum memberikan ruang yang proporsional untuk pembiayaan program/kegiatan inovatif.
- e. Kesulitan dalam mengakses kebijakan strategis dari pemerintah dan pemerintah provinsi.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan belum memadai.
- g. Koordinasi Lintas sektor terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memadai.



- h. Pengelolaan data statistik wilayah belum memadai.
- i. Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perekonomian wilayah belum memadai.
- j. Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum merata dan memadai dan alokasi anggaran untuk droping air masih belum memadai.
- k. Pengolahan pertanian masih dengan cara konvensional.
- l. Penjualan produk kehutanan dan perkebunan masih dalam bentuk bahan baku sehingga belum ada nilai tambah.
- m. Minimnya pengetahuan dan pemanfaatan nilai tepat guna.
- n. Orbitasi wilayah yang jauh dari pusat kota Yogyakarta Pendekatan pengarusutamaan *disaster risk reduction* belum diterapkan secara konsisten.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal pada bahasan ini adalah ruang yang berada di luar Kapanewon Panggang sebagai satuan kerja maupun Kapanewon Panggang sebagai wilayah dan berpengaruh terhadap kinerja dan perkembangan wilayahnya. Identifikasi lingkungan eksternal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan dan tantangan yang mungkin dimiliki dan dihadapi, selengkapnya sebagai berikut:

- a. Demokrasi sering ditengarai sebagai kebebasan berekspresi tanpa batas.
- b. Pelaksanaan demokrasi seringkali memecah masyarakat dan berbiaya mahal.
- c. Regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan pemda serta tata kelola pemda semakin rigit dan beragam, sehingga otda seakan hanya semu.
- d. Regulasi tentang pelimpahan kewenangan kepada kapanewon belum operasional.



- e. Regulasi yang mengatur tentang kepegawaian dan penghasilan aparaturnya dapat memicu kecemburuan di antara aparaturnya pemerintah.
- f. Ketergantungan pendapatan daerah kepada DAU dan DAK.
- g. Dampak westernisasi membawa pengaruh penurunan standar moralitas dan gaya hidup.
- h. Inkonsistensi antara jiwa keagamaan dan penerapannya dalam lingkungan pekerjaan.
- i. Pergantian musim yang semakin sukar diprediksi dan curah hujan rendah.
- j. Potensi terjadinya bencana alam.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P
1	2	3	4				5	6				7	8
			S 2	S1	D 3	SM A		S 2	S 1	D 3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	9	1	6	2		9	1	6	2		5	4
	2. Pengawas												
	3. Pelaksana	16		10	2	4	9		2	1	6	5	4
C.	Jabatan Fungsional												
	Jumlah	25	1	16	4	4	18	1	8	3	6	10	8

Sumber Data : Data Kepegawaian Kapanewon Panggang Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Panggang relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan,



didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (44,4 %), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (5,5 %), SLTA sebanyak 6 orang (33,3%), dan D3 ada 3 orang (16,7 %). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, Jumlah pegawai laki-laki 10 dan pegawai perempuan berjumlah 8 orang. Dari jumlah 8 pegawai perempuan, 4 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Alat Angkutan	9	296.455.636,00
2	Alat Pertanian	1	15.000.000,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	345	303.897.929,28
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16	34.46.994,00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	2.837.000,00
6	Alat Laboratorium	1	784.000,00
7	Komputer	33	176.611.884,00
8	Peralatan Olah Raga	4	1.135.000,00
9	Bangunan Gedung	6	3.091.296.045,18
10	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	373.300.000,00
11	Instalasi	3	128.119.500,00
12	Jaringan	2	15.470.000,00
13	Aset Tetap Lainnya	30	14.983.000,00
	Jumlah	453	4.454.359.988,46

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, dan 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet.



Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana bagi kelompok rentan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain:

- a. Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan kursi, meja, kipas angin.
- b. Bangunan ramah disabilitas

Kantor Kapanewon Panggang telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:

- pintu masuk yang mudah diakses
- toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas
- ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan

Gambar I.3 Pintu Masuk Kapanewon yang Mudah Diakses





Gambar I.4 Toilet Terpisah Laki-laki dan Perempuan



Gambar I.5 Ruang Tunggu Pelayanan



- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses



Gambar I.6 Halaman Luas



- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Gambar I.7 Fasilitas Sanitasi





Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1.	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
2.	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	40.000.000,00	33.660.000,00	-6.340.000,00
3.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.473.184.120,00	1.528.821.620,00	+ 55.637.500,00
4.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	46.206.000,00	28.671.000,00	-17.535.000,00
5.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	69.352.000,00	59.487.000,00	-9.865.000,00
6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	10.020.000,00	8.520.000,00	-1.500.000,00
7.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	109.127.900,00	103.137.900,00	-5.990.000
8.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	381.159.000,00	373.164.000,00	-7.995.000
Jumlah Keseluruhan		2.189.049.020,00	2.165.461.520,00	-23.587.500,00

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul semula Rp 2.189.049.020,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 2.165.461.520,00 atau berkurang Rp -23.587.500,00. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Panggang sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kapanewon Panggang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Kapanewon Panggang dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kapanewon Kapanewon Panggang Tahun 2021-2026, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas
- b. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan



Selanjutnya Kapanewon Panggang menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks		94,03	94,07	94,11	96,39	96,40	96,40
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	indeks	78,75	80	80,10	80,20	81,63	80,40	80,40
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	potensi		1	1	1	1	1	1



B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon meningkat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kapanewon	Meningkatkan Kualitas Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Prima
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
		Peningkatan Kapasitas Kalurahan dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan Kapasitas Kalurahan dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban
2	Meningkatnya akuntabilitas PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	46.206.000,00	28.671.000,00	- 17.535.000,00
	<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	14.645.000,00	10.620.000,00	-4.025.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.645.000,00	10.620.000,00	-4.025.000,00
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	31.561.000,00	18.051.000,00	-13.510.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.561.000,00	18.051.000,00	-13.510.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69.352.000,00	59.487.000,00	-9.865.000,00
	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	47.627.000,00	44.412.000,00	-3.215.000,00
	Sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	34.077.000,00	31.112.000,00	-2.965.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.550.000,00	13.300.000,00	-250.000,00



**Laporan Kinerja
Kapanewon Pangkajene Tahun 2025**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	21.725.000,00	15.075.000,00	-6.650.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	14.770.000,00	11.480.000,00	-3.290.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.955.000,00	3.595.000,00	-3.360.000,00
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.020.000,00	8.520.000,00	-1.500.000,00
	<i>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	6.422.500,00	11.622.500,00	-1.500.000,00
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.395.000,00	1.575.000,00	-820.000,00
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.625.000,00	6.945.000,00	-680.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	109.127.900,00	103.137.900,00	-5.990.000,00
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	109.137.900,00	103.137.900,00	-5.990.000,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	74.892.900,00	70.292.900,00	-4.600.000,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.235.000,00	32.845.000,00	-1.390.000,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	381.159.000,00	373.164.000,00	-7.995.000,00



Laporan Kinerja Kapanewon Panggang Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	381.159.000,00	373.164.000,00	-7.995.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	999.000,00	999.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.040.000,00	1.630.000,00	-410.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.610.000,00	15.530.000,00	-2.080.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.470.000,00	4.260.000,00	-210.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.430.000,00	2.350.000,00	-80.000,00
	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.780.000,00	1.370.000,00	-410.000,00
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	346.330.000,00	343.325.000,00	-3.005.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.500.000,00	3.700.000,00	-1.800.000,00
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		615.874.900,00	572.979.900,00	+42.885.000,00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Panggang Tahun 2025



Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
	<i>Kegiatan Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>-30.000.000,00</i>
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	40.000.000,00	33.660.000,00	-6.340.000,00
	<i>Kegiatan Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>33.660.000,00</i>	<i>-6.340.000,00</i>
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,00	33.660.000,00	-6.340.000,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.473.184.120,00	1.528.821.620,00	+ 55.637.500,00
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>11.475.000,00</i>	<i>9.410.000</i>	<i>-2.065.000,00</i>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.225.000,00	2.525.000,00	-700.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	920.000,00	640.000,00	-280.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	690.000,00	480.000,00	-210.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	800.000,00	800.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	760.000,00	585.000,00	-175.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.880.000,00	2.460.000,00	-420.000,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.200.000,00	1.920.000,00	-280.000,00
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>1.213.810.620,00</i>	<i>1.212.240.620,00</i>	<i>-1.970.000,00</i>



Laporan Kinerja
Kapanewon Panggang Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.206.600.620,00	1.206.600.620,00	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.110.000,00	4.540.000,00	-1.570.000,00
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>4.722.000,00</i>	<i>4.447.700,00</i>	<i>-275.000,00</i>
	Sub Kegiatan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.722.000,00	4.447.700,00	-275.000,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>46.908.800,00</i>	<i>57.171.300,00</i>	<i>-10.262.500,00</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.990.000,00	44.300.000,00	+ 11.310.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.651.300,00	2.651.300,00	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2.987.500,00	2.680.000,00	-307.500,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	3.980.000,00	3.240.000,00	-740.000,00
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>46.828.000,00</i>	<i>46.828.000,00</i>	<i>0,00</i>
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	19.752.000,00	19.752.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	15.576.000,00	15.576.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>77.042.000,00</i>	<i>81.614.000,00</i>	<i>+ 4.572.000,00</i>
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa surat menyurat	30.235.000,00	29.725.000,00	- 510.000,00



No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	34.207.000,00	39.289.000,00	+ 5.082.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>72.397.000,00</i>	<i>117.110.000,00</i>	<i>+ 44.713.000,00</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	16.000.000,00	60.713.000,00	+ 44.713.000,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3.897.000,00	3.897.000,00	0,00
	Total Anggaran Pendukung	1.573.184.120,00	1.592.481.620,00	-19.297.500,00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Panggang Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:



Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kapanewon Panggang Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon Nilai AKIP PD Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	94,15

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	94,15
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,30
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	5

Pada tahun 2025, Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2025	Indeks	96,39

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon Nilai AKIP PD Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	96,39
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81,63
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	5

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.6 Anggaran Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 28.671.000,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 59.487.000,-	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 8.520.000,-	APBD
4.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 103.137.900,-	APBD



No	Program	Anggaran	Keterangan
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 373.164.000,-	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.528.821.620,-	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 30.000.000,-	Dais
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 33.660.000,-	Dais

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id)

Gambar II.1. E-SAKIP



sumber: <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home>



2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Tampilan SIPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.2. SIPD



- b. **Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset)**, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset. Tampilan aplikasi Sim Aset dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.3. Sim Aset





- c. Aplikasi online input persediaan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung kinerja dalam penyusunan laporan persediaan/bahan habis pakai. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:

Gambar II.4. Persediaan



- d. SIPANDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi capaian indikator RKPD maupun RPJMD baik evaluasi fisik maupun evaluasi keuangan.

Gambar II.2. SIPANDA



Sumber: <http://sipanda.gunungkidulkan.go.id/index.php/dashboard/DashboardOPD>



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.



1. Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja Kapanewon Panggang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2x \text{ Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel III.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$



2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon Panggang tahun 2025. Adapun indikator kinerja utama kapanewon Panggang adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Kapanewon Panggang Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIA N 2024	TAHUN 2025				CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	0	96,38	96,39	96,42	100,03 %	Sangat Baik	100,02%
1.1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	0	96,38	96,39	96,42	100,03 %	Sangat Baik	100,02%
1.2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Nilai	78,75	81,62	81,63			Sangat Baik	
1.3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	0	5	5	5	5	Sangat Baik	5

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Kapanewon Panggang dianalisis secara terpadu karena menggunakan indikator kinerja yang sama atau sepadan. Kesamaan indikator tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tujuan dan sasaran, sehingga capaian sasaran strategis secara langsung merefleksikan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.



Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon. Pencapaian tujuan ini didukung dengan 2 sasaran yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pengukuran tujuan dan sasaran yaitu kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Panggang dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut: Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sesuai dengan tugas tersebut, kapanewon berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan sasaran strategis kapanewon yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan.



Pencapaian target sasaran ini, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Indeks Pelayanan Kapanewon diperoleh dari jumlah persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, KK miskin yang tertangani, penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.

Pencapaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat sebagai berikut

Tabel III.3 Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,39	96,42	100,03	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,03 %, Capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dengan realisasi 96,42 lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja 96,42 pada tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan pada 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2021, 2022, 2023, dan 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	80,50	94,03	94,07	96,38	96,42	96,40	100,02



Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 80,50 meningkat menjadi 94,03 pada tahun 2022, menjadi 94,07 pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 96,38 pada tahun 2024. Capaian realisasi kinerja di tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan target Renstra di tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 96,42.

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Konsistensi peningkatan kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon tersebut diperoleh dari:

a. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari 6 (enam) kalurahan di Kapanewon Panggang, semua Kalurahan dapat menetapkan APBKal 2026 dengan benar dan tepat waktu yaitu di Bulan Desember 2025.

b. Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari jumlah 6 (enam) kalurahan di Kapanewon Panggang, semua Kalurahan dapat menetapkan RKPKal 2026 dengan benar dan tepat yaitu di bulan September 2025.

c. Persentase KK miskin yang tertangani

Persentase persentase KK miskin yang tertangani tercapai 100%. Dari target KK Miskin yang dapat tertangani sejumlah KK. Target 432 terdiri dari bantuan tangki air bersih ke 400 KK dan PAH ke 32 KK.

d. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani tercapai 100%. Pada tahun 2025 tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban umum.

e. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, indeks kepuasan Masyarakat Kapanewon Panggang pada tahun 2025 tercapai 82,10 Data akhir tersebut diperoleh dari nilai survei komposit (gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu



penyelesaian, informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Dengan capaian kinerja dari pelayanan yang dilakukan Kapanewon Panggang kepada masyarakat .di atas dan dengan menggunakan formulasi penghitungan capaian kinerja:

$$\begin{aligned} &= \Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] \\ &+ [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] \\ &+ [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \\ &\text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + \\ &[20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}] \end{aligned}$$

maka capaian Indeks Pelayanan Kapanewon adalah:

$$\begin{aligned} &= \Sigma [20\% \times 100\%] + [20\% \times 100\%] + [20\% \times 100\%] + [20\% \times 100\%] + \\ &[20\% \times 82,10\%] \\ &= 96,42 \end{aligned}$$

Perbandingan capaian dengan standar

Realisasi ketepatan waktu penetapan RKPKal dan APBKal telah sesuai dengan peraturan di tingkat nasional. Ketepatan waktu penetapan RPKal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyebutkan bahwa RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Ketepatan waktu penetapan APBKal juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.



Adapun capaian nilai IPM Kapanewon Panggang sebesar 96,42 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nilai IKM Kabupaten Semester 1 2025 yang tercapai sebesar 81,90.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian Indeks Pelayanan Kapanewon adalah sebagai berikut:

Gambar III.1 Rapat Pembinaan penyusunan peraturan kalurahan di RR Kapanewon



Gambar III.2. Pendampingan Penyusunan RPKKal di RR Kapanewon Panggang





Gambar III.3. Forum Reformasi Birokrasi
di RR Kapanewon Panggang



Gambar III.4. Layanan Pengambilan Dokumen
di loket Pelayanan Umum



Gambar III.5. Pemantauan Pengamanan TPPR Gesing





Gambar III.6. Penerimaan Bantuan PAH



Pencapaian target Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kaparewun meningkat terutama didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis kaparewun, yaitu

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kaparewun Meningkat:

Tabel III.5 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kaparewun Meningkat

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025(%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Indeks Pelayanan Kaparewun	100	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi



No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025(%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	100	100 Sangat Tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100% termasuk kategori sangat tinggi.

Dalam melaksanakan program-program prioritas dianggarkan sebesar Rp 572.979.900,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 560.940.384,00 (97,90%) sehingga dengan capaian kinerja mencapai 100% terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,1% yang dirinci dalam tabel berikut:



Tabel III.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,39	96,42	100,03	572.979.900	560.940.384	97,90	2,1

Permasalahan:

1. Secara target waktu penyerahan dokumen siklus tahunan kalurahan, terutama dokumen APBKal seluruh kalurahan telah dilaksanakan tepat waktu dan telah ditetapkan maksimal 31 Desember 2025, namun demikian bila dikaji lebih dalam masih terdapat kekurangan dalam dokumen tersebut karena beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Terlambatnya informasi pagu dana transfer untuk kalurahan sehingga waktu penyusunan APBKal sangat pendek.
 - b. Masih kurangnya pemahaman Pamong dalam menyusun RPKal dan Rencana Anggaran Belanja pada APBKal sehingga menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam penulisan output dan ketepatan penempatan pendapatan/belanja pada rekening yang sesuai.
 - c. Tidak semua Pamong menyusun sesuai tupoksi dan menyusun RAB kegiatannya sendiri, RAB disusun oleh orang yang bukan membidangi, mengakibatkan penyusunan berjalan lambat dan terjadi ketidaktepatan karena penyusun belum memahami dan terjadi penumpukan pekerjaan hanya pada 1 orang.
 - d. Kepatuhan terhadap regulasi penyusunan (Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBKal, SHBJ, dll).



2. Meski di tahun ini tidak ada temuan penyimpangan dalam pengelolaan APBKal namun secara realita sumber daya aparatur di kalurahan dan kapanewon masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam hal penatausahaan keuangan kalurahan dan dalam hal pendampingan penyusunan RKPKal.
3. Proses perencanaan di kalurahan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga program dan kegiatan yang ada di RKPKal sinkron dan sinergis dengan dokumen RPJMKal dan nantinya mengalir secara harmonis menjadi APBKal.
4. Jam pelayanan dan disiplin kerja Pamong Kalurahan masih perlu ditingkatkan.

Solusi:

1. Koordinasi dan konsultasi intensif dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul.
2. Menganggarkan kegiatan bimbingan teknis dalam DPA kapanewon dan atau APBKalurahan guna meningkatkan kapasitas aparatur.
3. Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah kelurahan maupun kapanewon dalam menyusun dokumen perencanaan kalurahan.
4. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan publik terpadu perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan pembinaan perangkat kalurahan dengan menganggarkan DPA kapanewon dan atau APBKalurahan.

Sasaran 2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas



kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja menjadi sasaran yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan sasaran penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis Kapanewon Panggang. Indikator dari sasaran ini adalah Nilai AKIP PD. Definisi operasional dari indikator Nilai iAKIP PD adalah sebagai berikut

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Panggang Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 81,63 namun sampai laporan ini disusun, LHE AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Berdasarkan LHE Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul



Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/29 tanggal 26 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Kapanewon Panggang mendapatkan nilai 81,62 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Tabel III.8 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Nilai AKIP PD	80,20	81,62	101,77	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,20 terealisasi 81,62 sehingga capaian kinerja sebesar 101,77 %.

Sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 terdapat catatan/rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Kapanewon Panggang dengan melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Catatan/rekomendasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan Kapanewon Panggang adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Tahun 2024

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindaklanjuti
1	Perencanaan Kinerja	1. Belum menyusun pohon kinerja untuk menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	1. Agar menyusun pohon kinerja sebagai alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam	- Sudah ditindaklanjuti dengan menyusun pohon kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan



			menghasilkan outcome yang diinginkan pada periode selanjutnya sesuai dengan Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Kinerja Instansi Pemerintah
2	Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran kinerja belum optimal mempengaruhi penyediaan aktivitas dalam mencapai kinerja disebabkan belum menyajikan rencana aksi perubahan	1. Melakukan penyesuaian perubahan rencana aksi dalam rangka pengukuran kinerja untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran	1. Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian perubahan rencana aksi
3	Pelaporan Kinerja	1. Tidak terdapat catatan dalam Pelaporan Kinerja	1. Tidak terdapat rekomendasi dalam Pelaporan Kinerja	1. Tidak terdapat tindak lanjut dalam Pelaporan Kinerja
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Tidak terdapat catatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Tidak terdapat catatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Tidak terdapat tindak lanjut dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan nilai sebesar 1,05 dibanding tahun 2023 yang sebesar 81,05. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (n-1)				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
1	Nilai AKIP PD	79,50	80,70	81,05	81,62	80,40	101,5



Dari evaluasi data tersebut terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.11 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Nilai AKIP PD	101,5	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi

Dalam melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan sebesar Rp. 1.528.821.620,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp 1.460.665.623,00 (95,54%). Dengan capaian kinerja 101,5%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,46%.

Tabel III.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai AKIP PD	80,20	81,62	101,5	1.528.821.620	1.460.665.623	95,54	4,46



Permasalahan :

1. Permasalahan sering terjadi pada perumusan kebutuhan anggaran pagu gaji dan tunjangan kinerja, karena sering terjadi mutasi ataupun rotasi pegawai yang juga berpengaruh terhadap kebutuhan pagu gaji dan tunjangan kinerja di kapanewon.
2. Penggunaan air, Listrik yang tidak bisa diprediksi di awal, namun demikian sisa pagu Listrik dan pagu air merupakan komitmen penghematan dalam penggunaannya sehingga menjadikan nilai efisiensi bagi Kapanewon Panggang.

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
2. Meningkatkan koordinasi internal Kapanewon Panggang baik antara PPTK, PPK dan PA

Sasaran 3 "Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan ditetapkan sebagai target dari penerapan keistimewaan di tingkat kapanewon. Pembangunan keistimewaan DIY yang diarahkan ke kapanewon terkait dengan urusan penguatan kelembagaan di tingkat kapanewon dan urusan kebudayaan. Kelembagaan yang telah dibentuk harus didorong agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal sehingga dapat mempresentasikan tujuan Keistimewaan DIY. Sedangkan urusan kebudayaan diarahkan untuk mendorong pembangunan kebudayaan dalam arti luas dan juga diupayakan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun dengan dana keistimewaan.

Indikator Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan adalah jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) potensi. Pencapaian pada sasaran ini dijelaskan pada tabel



3.13 Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan sebagai berikut

Tabel III.13 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2024 (%)	Kategori
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	5	5	100	Sangat Tinggi

Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5 terealisasi sebesar 5 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat tinggi.

Realisasi kinerja 100% pada tahun 2025 sama jika dibandingkan pada 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2021, 2022, 2023 dan 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	5	5	1	5	5	100

Konsistensi capaian kinerja Pemerintah Kapanewon Panggang pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan didukung dengan Program Penyelenggaraan



Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel III.15 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	100	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	100	100 Sangat Tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100% termasuk kategori sangat tinggi.

Dalam melaksanakan program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan tersebut dianggarkan untuk urusan kebudayaan sebesar Rp. 30.000.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (100%), untuk urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan dianggarkan sebesar Rp. 33.660.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 33.660.000,00 (100%). Dengan capaian



kinerja 100% dan realisasi anggaran 100% maka efisiensi penggunaan sumber daya adalah 100%.

Tabel III.16 Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	5	5	100	63.660.000	63.660.000	100	0

Permasalahan:

1. Mekanisme pencairan harus dengan mekanisme TU

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi antara PPTK dan Tim Pelaksana Kegiatan

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Panggang meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Panggang pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari



perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Panggang. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Panggang. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Panggang).

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Panggang antara lain melibatkan perempuan dalam Proses Perencanaan Bantuan Sosial Jamban dan PAH bagi KK Miskin.



Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat



memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain pemanfaatan media sosial misalnya layanan PPID, Instagram dan youtube untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.

C. Efisiensi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp 2.142.239.250,00 atau 98,61 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.172.520.840.00

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut

Tabel III.17
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	29.999.605	100,00	395	0,00
1)	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja	30.000.000	29.999.605	100,00	395	0,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	33.660.000	33.657.976	99,99	2.024	0,01
1)	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	33.660.000	33.657.976	99,99	2.024	0,01



Laporan Kinerja
Kapanewon Panggang Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.528.821.620	1.460.665.623	95,54	68.155.997	4,46
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.410.000,00	9.407.800,00	99,98	2.200	0,02
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.212.240.620	1.158.266.555	95,55	53.974.065	4,45
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.447.700	3.976.740	89,41	470.960	10,59
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.171.300	56.683.723	99,15	487.577	0,85
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.828.000	45.893.298	98,00	934.702	2,00
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.614.000	73.335.545	89,86	8.278.455	10,14
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.110.000	117.078.700	99,97	31.300	0,03
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.671.000	21.255.451	74,14	7.415.549	25,86
1)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.620.000	5.094.827	47,97	5.525.173	52,03
2)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18.051.000	16.160.624	89,53	1.890.376	10,47
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	59.487.000	59.479.015	99,99	7.985	0,01
1)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.412.000	44.404.827	99,98	7.173	0,02
2).	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.075.000	15.074.188	99,99	812	0,01



Laporan Kinerja
Kapanewon Panggang Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
6.	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.520.000	8.519.771	100,00	229	0,00
1)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.520.000	8.519.771	100,00	229	0,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	103.137.900	101.884.148	98,78	1.253.752	1,22
1)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	103.137.900	101.884.148	98,78	1.253.752	1,22
8.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	373.164.000	369.801.999	99,10	3.362.001	0,90
1)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	373.164.000	369.801.999	99,10	3.362.001	0,90
Jumlah Keseluruhan		2.165.461.520	2.085.263.588	96,30	80.197.932	3,70

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.18 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	94,15	96,38	102,4	572.979.900	560.940.384	97,90	2,1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	80,20	81,62	101,77	1.528.821.620	1.460.665.623	95,54	4,46
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	5	5	100	63.6160.000	63.657.581,00	100,00	0
Jumlah Belanja Total				2.165.461.520	2.085.263.588	96,30	3,70



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Kapanewon melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Panggang, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, tampak bahwa kinerja Kapanewon Panggang pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Panggang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa



dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait dengan persoalan SDM, infrastruktur, pemenuhan kebutuhan air bersih dan kemiskinan.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Panggang yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja yang telah berada pada kategori sangat baik, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, maka diperlukan langkah perbaikan kinerja yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pertama, perbaikan kinerja difokuskan pada program yang berkaitan langsung terhadap persoalan riil masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan isu kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan ketepatan sasaran program/kegiatan, penguatan basis data perencanaan, serta penyesuaian intervensi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, sehingga capaian indikator kinerja benar-benar mencerminkan dampak pembangunan.



Kedua, penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi langkah strategis dalam perbaikan kinerja. Koordinasi lintas sektor perlu dibangun secara sistematis melalui mekanisme perencanaan bersama, integrasi program antar perangkat daerah, serta peningkatan peran mitra non-pemerintah. Sinergi yang dilandasi pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pihak akan meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran.

Ketiga, hasil evaluasi LKjIP dimanfaatkan secara aktif sebagai instrumen perbaikan siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Setiap temuan, permasalahan, dan rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada komponen pelaporan, tetapi ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan tahun berikutnya. Dengan demikian, LKjIP berfungsi sebagai bagian dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, sekaligus menjadi pijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.



LAMPIRAN

1. *Perjanjian Kinerja Kapanewon Panggang Tahun 2025 beserta perubahannya*
2. *Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Kapanewon Panggang Tahun 2024*

